

Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk

**Andy Chandra Pramana¹, Nonni Yap²,
Meme Rukmini³, Sulthon Mahmudi⁴, Eka Agustina⁵**

Universitas Kadiri

Email: andychandra@unik-kediri.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk berikut dengan analisis implementasinya yang dianalisis dengan pendekatan implementasi Van Meter dan Van Horn. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Informan dalam penelitian ini adalah para ASN BPKAD Kabupaten Nganjuk yang benar-benar mengetahui bagaimana implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Nganjuk. Hasil dari penelitian ini adalah SIPD masih memiliki kelemahan atau kendala dalam penerapannya, diantaranya adalah kurang efektif dan efisien, lambat, dan masih perlu didampingi oleh sistem yang lain. Hasil analisis implementasinya adalah SIPD belum dapat diimplementasikan secara penuh karena masih banyak fitur-fitur yang belum muncul, SIPD juga belum optimal karena belum dapat berdiri sendiri.

Kata kunci: Implementasi; Sistem Informasi; Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Abstract

This study aims to find out how the implementation of SIPD in BPKAD Nganjuk Regency along with an analysis of its implementation which is analyzed with Van Meter and Van Horn implementation approaches. This type of research is descriptive quantitative. The informants in this study were ASNs of BPKAD Nganjuk Regency who really knew how to implement SIPD in BPKAD Nganjuk Regency. The result of this study is that SIPD still has weaknesses or obstacles in its application, including being less effective and efficient, slow, and still needs to be accompanied by other systems. The result of the implementation analysis is that SIPD cannot be fully

implemented because there are still many features that have not appeared, SIPD is also not optimal because it not independent yet.

Keywords: *implementation; information system; local government information system*

A. PENDAHULUAN

Peran Pemerintah Daerah sebagai Pengelola Keuangan Negara di Tingkat Daerah tentu menimbulkan kerumitan yang tinggi. Banyaknya SKPD membuat proses rekonsiliasi dan konsolidasi menjadi sangat kompleks (Vanessa, Wulandari & Driyatini, 2022). Tentunya hal tersebut telah disikapi oleh Pemerintah Pusat, salah satu contohnya adalah dengan mengeluarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 versi *update* dari Permendagri NO. 13 Tahun 2006 yang membahas pengelolaan keuangan daerah. Dengan munculnya Peraturan baru tersebut, maka seluruh SKPD di Indonesia diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sebuah sistem yang diluncurkan oleh Pemerintah guna mensinergikan keuangan dengan teknologi guna mempermudah penggunaanya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel (Afifah et al., 2023).

SIPD bukan sistem yang pertama kali diluncurkan, sebelumnya telah diterapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) guna mendukung pengelolaan keuangan daerah. Peralihan dari SIMDA ke SIPD tentunya memerlukan masa transisi. Setiap Pemerintah Daerah tentunya memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda, sehingga implementasi SIPD pun tidak dilakukan secara serentak (Afifah et al., 2023). Kabupaten Nganjuk telah menetapkan akan memulai masa transisi penerapan SIPD pada pelaporan keuangan tahun 2022 ini. Hal ini menjadi menarik untuk dijadikan sebuah ide penelitian, bagaimakah

implementasi SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk, apakah berjalan lancar ataukah masih akan menemui kendala.

BPKAD Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa bidang, yaitu bidang Sekretariat, Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Akuntansi dan Pelaporan (Pramana, 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana implementasi SIPD pada semua bidang tersebut kemudian menganalisis implementasinya terhadap masing-masing bidang tersebut.

Hasil penelitian (Alifia, 2021) menunjukkan bahwa aplikasi SIPD masih sering error sehingga perlu adanya penyempurnaan terhadap sistem SIPD. (Nasution & M.Si, 2021) menyatakan implementasi SIPD di Kota Medan masih menemui banyak kendala sehingga penulis tersebut menilai masih perlu adanya sosialisasi yang mendalam serta pendampingan dari Pemerintah Pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk, yang mana terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu (Afifah et al., 2023) melakukan penelitian di Kabupaten Wonosobo, dengan fokus penelitian implementasi SIPD untuk perencanaan pembangunan pada Bappeda, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi yang menyeluruh, tidak hanya pada tahap perencanaan pembangunan saja tetapi dari perencanaan pembangunan hingga pelaporan akuntansinya pada BPKAD. Kemudian setelah mengetahui implementasinya, penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan tersebut menurut Van Meter dan Van Horn

melalui 6 aspek, standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi adalah keterjadian setelah sebuah undang-undang ditetapkan. Istilah implementasi merupakan penerapan akan sebuah perundangan yang tengah diberlakukan dengan tujuan tertentu (Akib, 2010). Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sebuah kebijakan sebagai hasil proses politis harus diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata dan tindakan melalui proses implementasi (Aneta, 2010).

Sistem Informasi merupakan sinergi antara teknologi informasi dan penggunaannya (Balqis & Fadhly, 2021). Keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya berdasarkan informasi yang dihasilkan tetapi juga dilihat dari ketepatan waktunya juga (Saputra, 2020). Pengguna atau pemakai dan ketetapan nilai merupakan komponen penting dalam sebuah sistem informasi (Dewi & Setyaningsih, 2022).

Definisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi. Sementara itu SIPD memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi

diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (Balqis & Fadhly, 2021).

Perwujudan tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah dengan adanya transparansi atau keterbukaan informasi. Keberadaan SIPD salah satunya adalah untuk mendukung terciptanya keadaan tersebut. (Alifia, 2021).

C. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah riset atau penelitian yang bersifat analisis dan berdasarkan dari fakta dan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang beryujuan untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan (Moleong, 2007).

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang akurat dan yang bertanggung jawab dalam menangani Aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk
2. Sekretaris BPKAD Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk
5. Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Kabupaten Nganjuk
6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Nganjuk

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data dari

sumbernya tanpa melalui perantara. Data ini merupakan data yang dikumpul dari metode interviu atau wawancara dari informan yang dapatkan langsung dengan komunikasi secara langsung dengan informan (Sekaran & Bougie, 2016). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku- buku artikel-artikel, arsip serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto- foto sebagai bukti penelitian yang benar (Sekaran & Bougie, 2016).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan analisis kualitatif. Karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang berbentuk keterangan-keterangan dan bukan berupa angka-angka. Analisis kualitatif dianggap lebih tepat dalam penelitian ini, sebab analisis ini diharapkan dapat lebih memungkinkan untuk mengembangkan penelitian ini agar bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam (Moleong, 2007).

Setelah data-data terkumpul, penulis membuat suatu analisis dari data-data yang telah penulis dapatkan dari penelitian dan akan diolah. Data yang diperoleh menggunakan teknik analisis data kualitatif (Indriantoro, 2019). Dan selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data ialah proses penyederhanaan data menjadi lebih ringkas, sehingga mudah untuk dianalisis. Pengumpulan data wawancara bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta hasil studi lapangan atau studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian (Moleong, 2019).

Deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini untuk analisis data, dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari wawancara, naskah data sekunder dan lainnya (Moleong, 2019).

Untuk menganalisis penerapan SIPD digunakan parameter teori penerapan dari Van Meter dan Van Horn yakni (Sirajuddin, 2016):

1. Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

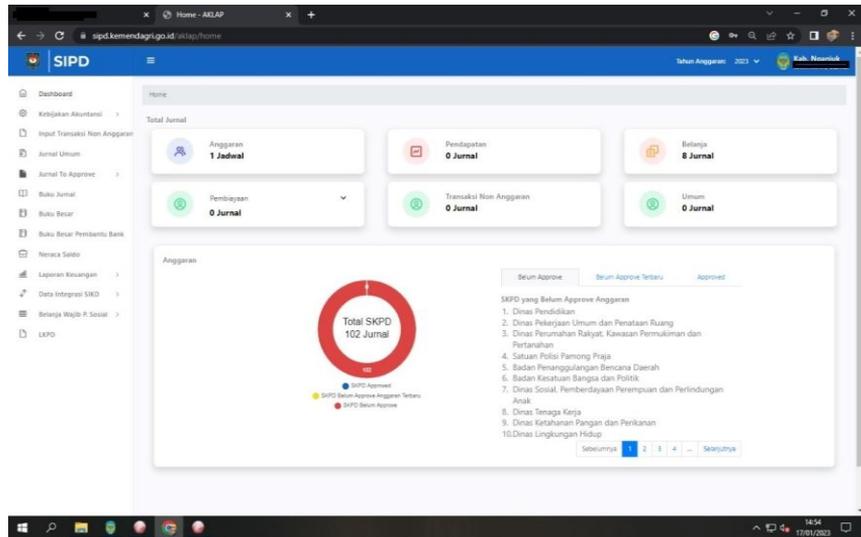
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dibuat dan diimplementasikan untuk membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, pengadaan sebuah system pada hakikatnya adalah untuk mempermudah pekerjaan pengguna system. Pada penelitian ini Penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk, maka dari itu, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap paling mengetahui bagaimana SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk diterapkan. Informan pertama, Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk, ketika diberikan pertanyaan wawancara terkait penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk, yang bersangkutan memberikan jawaban bahwa beberapa Bidang di dalam BPKAD Kabupaten Nganjuk telah diikutsertakan dalam pelatihan SIPD di Jakarta secara bergantian, terakhir adalah Bidang Akuntansi dan Pelaporan telah menerima Pelatihan Modul Penatausahaan selama

2 hari, yaitu pada tanggal 16 dan 17 bulan November 2022. Bidang yang paling bersinggungan dengan SIPD adalah Bagian Anggaran dan Perbendaharaan. Ibu Kepala Badan (Kaban) menambahkan bahwa per 1 Januari 2023 ini SIPD telah diterapkan tanpa aplikasi pendamping atau SIMDA. Sekretaris BPKAD Kabupaten Nganjuk menambahkan bahwa SIPD ini diterapkan atas dasar Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang menerangkan bahwa aplikasi yang digunakan pada tingkat Pemerintah Daerah adalah SIPD. Penerapannya masih belum 100% karena masih ada aplikasi yang mendampingi yaitu SIMDA atau system yang lama. Penerapan ini sifatnya bertahap, kendala-kendala kecil pastinya akan ada karena ini merupakan aplikasi baru.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sudah mulai menerapkan SIPD tetapi masih didampingi oleh aplikasi yang lama yaitu SIMDA. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa aplikasi SIPD dapat dipelajari penggunaannya melalui keikutsertaan dalam Pelatihan. Kepala Bidang menunjuk dan menugaskan staf nya untuk mempelajari secara mendalam agar dapat menguasai sistem tersebut dan lancar saat pengoperasian. Sementara, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Nganjuk menilai bahwa SIPD seakan akan seperti aplikasi yang belum 100% jadi karena masih banyak menu yang tidak bisa dibuka seperti dilihat pada tampilan di bawah ini:

Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk



Gambar 1.1 Tampilan Dashboard SIPD

Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa bidangnya tmasih menggunakan aplikasi SIMASET untuk pekerjaan Pengelolaan BMD dan mengatakan tidak menerima modul SIPD seperti bidang-bidang yang lain.

Tidak ada sistem yang sempurna, maka dari itu semua sistem terus memberikan *update* yang sesuai dengan perencanaan ataupun sesuai dengan bug yang ditemukan. Begitu juga SIPD, SIPD masih memiliki kelemahan atau kendala dalam penerapannya. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa antara modul penatausahaan atau website dengan modul Akuntansi dan Pelaporan belum terhubung atau connect. Hal ini menyebabkan harusnya melakukan input ulang secara manual, sehingga SIPD dinilai kurang efektif dan efisien. Selain itu, server SIPD juga sering lelet atau lemot. Ibu Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk menyatakan perlunya pendampingan dari Pusat bagi para staf

yang secara langsung mengoperasikan SIPD, karena yang namanya sistem kalau ada salah sedikit saja pasti akan berdampak secara sistemik.

Hasil analisis penerapan SIPD menganalisis menggunakan parameter teori penerapan dari Van Meter dan Van Horn yakni:

1. Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Peluncuran, sosialisasi dan penerapan SIPD telah sesuai dengan sasaran kebijakan, yang mana diadakannya sebuah sistem adalah untuk mempermudah pengguna sistem. Walaupun dalam pelaksanaan penerapannya masih menemui banyak kendala tetapi secara hakikat tujuan kebijakan, SIPD ini telah memenuhi standar.

Penyempurnaan penerapan masih perlu adanya update versi dari aplikasi SIPD untuk membuka menu-menu yang belum bisa dibuka dan juga perlu adanya pendampingan dari Pusat disertai dengan beberapa Pelatihan tambahan.

2. Sumber daya

Berbicara tentang sumber daya, berarti mengarah kepada pengguna SIPD. Secara sistem, SIPD tergolong sebagai sistem yang user friendly atau dengan kata lain, tidak menyulitkan pengguna dalam pengoperasian system hanya saja masih ada keluhan terhadap server yang sering lemot.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Penerapan SIPD telah tepat apabila dilihat dari karakteristik pengguna atau organisasi pelaksana, yang mana SIPD ini ditujukan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Karakteristik yang sama ialah Pemerintah Pusat dan Daerah sama-

sama sebagai Pengelola Keuangan, hanya berbeda pada tingkatannya saja yaitu Keuangan Negara dan Keuangan Daerah.

4. Komunikasi antar organisasi

SIPD mengambil fungsi komunikasi antar organisasi, yang mana di dalam SIPD terdapat fungsi integrasi dengan organisasi lain. SIPD menyediakan fitur integrasi data-data antar organisasi.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana tidak dapat dianalisa pada penerapan SIPD ini, karena Penerapan ini bersifat wajib dan diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang menerangkan bahwa aplikasi yang digunakan pada tingkat Pemerintah Daerah adalah SIPD. Sehingga mau tidak mau, suka maupun tidak suka maka para pengguna akan tetap menerapkan sistem ini.

6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Hal ini juga tidak dapat di-*generate* ke dalam sebuah Analisa karena penerapan suatu system tidak berdampak langsung kepada lingkungan social, politik dan ekonomi.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari (Dewi & Setyaningsih, 2022) yang melihat SIPD dari kualitas sistem yang belum sempurna, hal ini juga dirasakan oleh pengguna SIPD di Kabupaten Nganjuk yang menyatakan bahwa SIPD seakan-akan sebuah sistem yang belum jadi atau belum final karena masih terdapat menu yang kosong.

Implementasi SIPD di Kabupaten Nganjuk, khususnya di BPKAD juga mengeluhkan SIPD tidak berjalan dengan lancar karena adanya kendala dari *server* yang lemot, hasil penelitian (Afifah et al., 2023)

juga menyatakan adanya keluhan server yang lemot pada implementasi SIPD di Bappeda Kabupaten Wonosobo.

E. PENUTUP

Simpulan dan Saran

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Nganjuk masih belum sepenuhnya diterapkan karena masih didampingi dengan penggunaan aplikasi yang lama yaitu SIMDA. Terdapat beberapa kendala yaitu beberapa fitur atau menu tidak dapat diakses, modul penatausahaan dengan modul Akuntansi dan Pelaporan belum terhubung atau belum connect dan keluhan server yang lelet atau lemot.

Berdasarkan analisa analisis penerapan SIPD digunakan parameter teori penerapan dari Van Meter dan Van Horn, hasilnya adalah: SIPD telah sesuai fungsinya yaitu untuk mendukung kebijakan memudahkan pengguna yakni pengelola keuangan negara dengan karakteristik yang sama yaitu mengelola keuangan negara baik di Pusat maupun Daerah, tampilan yang user friendly dan dapat mengintegrasikan data antar organisasi membuat SIPD dapat diandalkan untuk sistem baru untuk pengelola keuangan.

Saran yang dapat disampaikan kepada peneliti selanjutnya adalah agar meneliti penerapan SIPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain. Peneliti selanjutnya juga bisa melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dari berbagai macam hasil penelitian penerapan itu nantinya agar dapat merepresentasikan penerapan SIPD di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai referensi perbaikan atau update SIPD versi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). *Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (sipd) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo*. 7(2).
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Aneta, A. (2010). Model Dan Pendekatan Implementasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 55–65.
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246>
- Dewi, & Setyaningsih, E. (2022). Analisis Kualitas Website SIPD Penajam Paser Utara Menggunakan Webqual 4.0. *Metik Jurnal*, 6(1), 24–29. <https://doi.org/10.47002/metik.v6i1.322>
- Indriantoro, N. (2019). *Metode Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan Mnajamen*. Andi.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109.
<https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

Pramana, A. C. (2022). Analysis Of The Completion Of Follow-Up Results Of The Examination Of The Financial Statements Of The Nganjuk Regency Regional Government. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 210–215.
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILAN CIA/index>

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Saputra, N. ketut sudianing dan agus. (2020). *Staf Pengajar Universitas Panji Sakti 1*. 12(1), 60–69.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. john wiley & sons.

Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>